

capres dari parpol ketimbang kandidat legislatif dari parpol yang bersangkutan. Jangan terbuai oleh publisitas para capres yang dikemas oleh media dengan menutupi pelbagai kekurangan mereka. Bila masalah kesenjangan dan kemiskinan bertambah terpuruk di kemudian hari, maka dapat diperkirakan akan munculnya bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya berupa protes, demonstrasi, maupun gerakan sosial. Selamat memilih. — Drs. Ganda Upaya, M.A. (Dosen Departemen Sosiologi UI)

#### EVENT

SERI DISKUSI PEMILIH MUDA (2-5 April 2014 pukul 17.00)

(03/04) Media Massa : Masa sih? | (04/04) Golput : Mengubah Tanpa Memilih? | (05/04) Anak Muda, Main Netral!

Teras Kita : Jl. Kemang raya no. 83 H

www.pamflet.or.id | @\_pamflet | Indah (08128287440)



*Think Beyond, Think Different*

## Partisipasi Politik dalam Pemilu

Seminggu lagi rakyat Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum yang keempat setelah tumbang rezim Orde Baru pada Mei 1998. Pemberian suara yang dilakukan oleh rakyat ke kotak-kotak suara pada hari H pemilu dalam kehidupan politik Indonesia selama ini identik dengan pesta demokrasi—pemberian suara dimaknai sebagai perwujudan demokrasi. Dengan melihat besarnya jumlah suara yang diberikan oleh rakyat pada setiap Pemilu, maka disimpulkan bahwa partisipasi politik telah mencapai sasarannya. Jika konsep partisipasi politik diberi makna berdasarkan hanya dari keterlibatan rakyat di dalam “pesta demokrasi”, maka batasannya sangat sempit.

Menurut Verba, Nie, dan Kim, yang melakukan studi tentang partisipasi politik di tujuh negara mengatakan bahwa: *“By political participation we refer to those legal acts by private citizens that are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/ or the actions they take”* (Verba et al, 1978: 1). Tampak definisi ini menekankan tindakan-tindakan yang syah menurut hukum bagi warga untuk berpartisipasi di dalam kehidupan politik. Selanjutnya ketiga pakar ini menunjukkan beberapa bentuk partisipasi politik sebagai berikut: kampanye dan pemberian suara di dalam pemilihan umum, memperjuangkan kepentingan publik baik secara individual, kelompok, dan organisasi, serta melakukan kontak atau lobi kepada pejabat pemerintah, agar aspirasi mereka diwujudkan ke dalam kebijakan-kebijakan publik. Mereka bertiga menolak tindakan kudeta, pemberontakan, dan revolusi sebagai bentuk-bentuk partisipasi politik. Mereka juga menolak rekayasa politik yang berupa mobilisasi massa sebagai bentuk partisipasi politik.

#### Ayo Ikut Kontribusi!

Kamu dapat mengirimkan karya tulisan berupa Opini, Resensi atau Kajian yang bersifat sosiologis. Dapat juga berupa Gambar, Foto, Video, atau Cerpen yang bertemakan isu sosial. Kirim ke [sociozine@gmail.com](mailto:sociozine@gmail.com)

Sociozine merupakan majalah yang dikelola oleh Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Indonesia. Sebagian besar karya, setiap minggunya kami terbitkan pada *webzine* sociozine.com. Sociozine hadir untuk turut berkontribusi meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam melihat realita sosial melalui kacamata sosiologis.

Sociozine membahas berbagai fenomena kehidupan, baik itu fenomena berbau sosial, politik, budaya, agama, pendidikan, maupun bahasan ringan seperti musik, film, sepak bola, hobi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Kami akan menyajikan berbagai karya—tulisan, gambar, video, info dan/atau liputan mengenai suatu acara maupun diskusi yang dikemas sedemikian rupa menjadi karya populer yang menarik, kreatif, humoris namun tetap bercita rasa sosiologis. Tujuannya adalah untuk menyadarkan kita semua bahwa sosiologi merupakan ilmu yang dapat ditemui dan digunakan bahkan dalam hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. *Sociology for everyday life*.

Semua karya yang ada dibuat berdasarkan imajinasi sosiologis. *Seeing the general in particular, seeing the strange in familiar, and seeing individual choice in social context*. Menjadikan Sociozine sebagai sumber informasi serta bacaan sosiologis yang gamblang dan kritis. Menjadi suatu lensa pembesar untuk meneropong apa yang sulit dilihat dalam berbagai hal yang terlihat biasa, yang *taken for granted*. Menjadi alat untuk mengasah kita semua berpikir *beyond common sense*. *Think beyond, think different*.

Bagi mereka, partisipasi politik itu dilakukan oleh para warga secara sukarela tanpa harus melakukan kekerasan di dalam kerangka hukum yang berlaku di seluruh wilayah negara.

Di lain pihak, Samuel Huntington dan Joan Nelson berpendapat bahwa partisipasi politik dapat dilakukan baik secara legal maupun illegal, dengan menggunakan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Sehingga Huntington dan Nelson selain menunjukkan bentuk-bentuk partisipasi politik yang serupa dengan Verba, Nie, dan Kim, yakni kampanye dan pemberian suara di dalam pemilihan umum, memperjuangkan kepentingan publik baik secara individual, kelompok, dan organisasi, serta melakukan kontak atau lobi kepada pejabat pemerintah, agar aspirasi mereka diwujudkan ke dalam kebijakan-kebijakan publik, mereka berdua menambahkan bahwa partisipasi politik termasuk menghalalkan tindakan kudeta, pemberontakan, revolusi, dan bahkan mobilisasi politik yang direkayasa oleh penguasa sebagai *we mean activity by private citizens designed to influence government decision making*" (Huntington and Nelson, 1976: 3). Tampak definisi ini tidak menyinggung aspek legal ataupun ilegal dari partisipasi politik, yang penting adalah warga dapat mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik.

Dari uraian konseptual di atas, tampak para ilmuwan berbeda pendapat tentang bentuk-bentuk partisipasi politik. Pendapat yang pertama (Verba, Kim, dan Nie) menekankan tindakan-tindakan yang syah menurut hukum, sedangkan pendapat yang sebaliknya (Huntington dan Nelson) menghalalkan segala cara dalam mewujudkan partisipasi politik. Namun, mereka berpendapat sama bahwa kampanye dan pemberian suara yang dilakukan oleh rakyat dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Lebih jauh Huntington (1993) menyatakan bahwa dalam pemilihan umum yang terjadi sebenarnya adalah **kontestasi antar kandidat** dalam merebut suara rakyat di kotak-kotak suara dan **partisipasi politik dari rakyat** sebagai warga negara yang memberikan suaranya kepada para kandidat DPR, DPD, dan DPRD di kotak

Sumber : [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)



-kotak suara.

Bila melihat pada fungsi legislatif seperti pendidikan politik, artikulasi kepentingan rakyat, melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah (eksekutif), dan membuat pelbagai kebijakan publik termasuk undang-undang bersama pihak eksekutif, maka kedudukan para anggota legislatif sangat strategis dalam membangun pelbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat Indonesia. Di lain pihak, data berikut ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2012 sebanyak 28 juta jiwa (11,37 persen dari total penduduk Indonesia saat ini sekitar 245 juta jiwa); pendapatan per kapita warga Indonesia tahun 2013 sekitar 5.170 dolar AS setara Rp. 55 juta per tahun, namun BPS juga menunjukkan bahwa distribusi pendapatan atau rasio ini memberikan tendensi yang melebar, yaitu dari 0,35 tahun 2008 menjadi 0,41 tahun 2010—semakin besar koefisien ini, semakin memperlihatkan kian lebarnya ketimpangan di Indonesia. Melihat data di atas dapat disimpulkan bahwa yang menikmati kue ekonomi adalah kelas menengah dan terutama kelas atas.

Dari data ini saja kita sebagai warga negara harus memikirkan dengan penuh keprihatinan akan masa depan Indonesia. Bila sejempit data di atas tidak dikoreksi maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan menurut peraih nobel ekonomi Amartya Sen akan mempunyai efek berantai yang tidak hanya berupa rendahnya kesejahteraan rakyat tetapi juga menimbulkan krisis ekonomi dan politik yang tajam. Untuk itu, sebagai warga negara kita harus memberikan suara kepada para kandidat yang tidak hanya mempunyai visi dan misi yang jelas tentang Indonesia, pendidikan yang memadai dan tentunya kapasitas. Sebaiknya kritis terhadap para kandidat karena kampanye politik lebih menonjolkan